

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dan berada di peringkat ketiga dalam capaian investasi secara nasional. Namun demikian, fenomena pengangguran terdidik masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan kondisi tersebut serta hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Kondisi ini menjelaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan pengangguran terdidik, karena berkurangnya aktivitas ekonomi yang menghambat penciptaan lapangan kerja bagi lulusan berpendidikan.
2. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik. Kondisi ini menjelaskan bahwa peningkatan investasi di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan meningkatnya pengangguran terdidik, karena mayoritas investasi mengalir ke sektor padat modal, bukan padat karya yang menyerap tenaga kerja berpendidikan.
3. Inflasi belum mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur karena lebih dipicu oleh biaya produksi, bukan permintaan yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

4. Inflasi belum mampu memoderasi pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik. Kondisi ini menjelaskan bahwa inflasi tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur, karena inflasi yang terkendali tidak cukup menekan efektivitas investasi dalam menyerap tenaga kerja terdidik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Sedangkan dari aspek investasi sebaiknya difokuskan pada sektor padat karya yang berpotensi menciptakan banyak lapangan kerja, bukan pada sektor padat modal yang rendah serapan tenaganya.
2. Perlu adanya harmonisasi dari aspek pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri melalui program peningkatan keterampilan berbasis pasar kerja, serta memperkuat kebijakan pendukung lainnya. Kolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pendidikan perlu diperkuat guna merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif terhadap kebutuhan industri. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kualitas SDM dan daya saing wilayah agar pertumbuhan ekonomi berdampak nyata dalam menurunkan pengangguran terdidik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel moderasi yang

relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran terdidik. Penggunaan data panel antar kabupaten/kota atau pendekatan spasial juga dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif.